

PEMBERDAYAAN RAKYAT DALAM REFORMASI PENDIDIKAN

Oleh
SUTOYO *)

ABSTRACT

Empowering people in educational reformation is an essential problem because in fact the educational problem is an endless issue to discuss. It means that the problem needs more solutions. The reformation should be realized by employing educational democracy, including institutional structure, educational system, personnel, and curriculum.

To reform in educational field really needs the solutions and development, including increasing the quality of Human Resources, the quality and quantity of educational facilities, improving and completing the curriculum, and increasing the quality of education process.

Key words : People empowering, Educational reform

*) Dosen Fakultas Keguruan Ilmu Pendidikan UNISRI

Pendahuluan

Berbicara tentang pemberdayaan rakyat dalam reformasi pendidikan merupakan hal yang menarik. Hal ini disebabkan kita akan dihadapkan pada suatu kompleksitas permasalahan yang klasik, fundamental, dan aktual. Klasik, karena masalah pendidikan merupakan pusat perhatian para filsuf pada zaman Yunani kuno yang menyebarluaskan ajaran-ajarannya dengan implikasi yang sangat luas dan menyentuh berbagai dimensi kehidupan. Fundamental, karena dunia pendidikan merupakan tempat penyemaian nilai-nilai untuk diberikan kepada manusia guna menyongsong masa depan. Aktual, karena sampai kapanpun setiap bangsa atau masyarakat akan memandang bahwa pendidikan merupakan masalah yang mutlak sebagai sarana untuk membina dan mengembangkan diri. Oleh karena itu tatanan dan sistemnya hendaknya menyesuaikan dengan perkembangan.

Secara realita masalah dunia

pendidikan merupakan masalah yang seakan-akan tidak ada ujung dan pangkalnya. Artinya antara permasalahan yang muncul justru lebih banyak dari pada solusinya.

Sejalan dengan derasnya arus reformasi yang menggelinding di akhir abad ini permasalahan di bidang pendidikan nampak lebih transparan termasuk kemungkinan alternatif-alternatif pemecahannya, jika dibandingkan dengan masa sebelum reformasi. Rakyat sebagai subyek pembangunan yang selama orde baru kurang mendapatkan perhatian dalam hal kebebasan untuk menyalurkan aspirasi individu atau kelompok perlu diberikan peluang-peluang untuk menyampaikannya. Selanjutnya aspirasi perlu ditanggapi secara positif sehingga keputusan yang akan diambil dapat diterima oleh pihak-pihak yang berkepentingan.

Jelasnya pemberdayaan rakyat dalam reformasi pendidikan bukanlah suatu yang berdiri sendiri, namun berada dalam suatu konteks.

Tantangan Bidang Pendidikan

Pada masa orde baru pembangunan di bidang pendidikan telah menunjukkan keberhasilannya, namun masih banyak hal yang perlu terus dilakukan perubahan-perubahan dalam rangka penyempurnaan. Hal ini disebabkan, bahwa dunia pendidikan dewasa ini sedang dilandasi arus perubahan secara mendasar, spektakuler, dan global/mondial. Hal ini tidak lain karena efek samping dari adanya kemajuan Iptek. Di mana Iptek bukan sekedar sarana bagi kehidupan manusia, melainkan suatu yang substantif. Melalui iptek inilah yang akhirnya menyentuh kehidupan manusia baik secara intensif maupun ekstensif.

Kita akui bahwa masyarakat Indonesia telah mengalami masa transisi. Melalui celah-celah transisi inilah pengaruh iptek benar-benar kita rasakan. Fenomena-fenomena yang nampak secara mendasar, antara lain : (1) Transisi masyarakat agraris tradisional menuju masyarakat industri modern. Dalam hal ini peranan metos diambil oleh logika rasio. Semula kekuatan kosmis dianggap sebagai penguasa alam sekitar, namun melalui proses inilah justru daya nalar yang mampu memprediksi masa mendatang kaitannya dengan kehidupan manusia dan alam sekitarnya ; (2) Transisi masyarakat etnis ke daerah menuju masyarakat Negara kebangsaan (national state). Sikap wawasan kebangsaan yang utuh membentuk jati diri bangsa yang berdasarkan Pancasila dan Undang Undang Dasar 1945; (3) Transisi masyarakat dengan budaya nasional menuju budaya global-mondial. Visi, orientasi dan persepsi mengenai hal-hal yang bersifat universal, seperti hak azasi, kemerdekaan, keadilan, kebenaran dan sebagainya dilepaskan dari ikatan "fanatisme primordial" menuju satu kesatuan sintesis yang lebih

konkrit dan fungsional. Batas-batas sempit kesukuan, kebangsaan mengendor menjadi kesadaran kosmopolitan yang bersifat universal, seperti hak azasi, kemerdekaan, keadilan, kebenaran dan sebagainya dilepaskan dari ikatan "fanatisme primordial" menuju satu kesatuan sintesia yang lebih konkrit dan fungsional. Batas-batas sempit kesukuan, kebangsaan mengendor menjadi kesadaran kosmopolitan yang bersifat terbuka dan eklektis.

Disamping perubahan-perubahan tersebut yang menuntut konsekuensi logis, dunia pendidikan dihadapkan pada kualitas sumber daya manusia dalam menghadapi era global. Ada tiga aspek yang menjadi komponen yang menjadi sumber daya manusia yang berkualitas, yakni : (1) aspek watak kepribadian; (2) aspek ketrampilan, (3) aspek kecendekiaan.

Dalam kondisi yang tidak menentu saat ini bangsa Indonesia harus mempunyai keunggulan kompetitif diantaranya adalah keunggulan sumber daya manusia yang menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi serta memiliki kekuatan iman dan taqwa.

Secara realitas dapat dilihat, bahwa penerapan demokrasi di bidang pendidikan yang menyangkut struktur kelembagaan, sistem pendidikan, kepegawaian dan kurikulum belum seperti yang kita harapkan. Akhirnya secara operasional pelaksanaannya banyak mengalami kendala dan hasilnya belum seperti yang diharapkan. Munculnya KKN (Kolusi, Korupsi, dan Nepotisme) di bidang pendidikan merupakan faktor penghambat keberhasilan pendidikan.

Antisipasi alternatif

Munculnya permasalahan di bidang pendidikan terkait dengan bidang yang lain, seperti ekonomi, hukum dan lain sebagainya. Berdasarkan permasalahan yang muncul

seperti telah diuraikan di atas, maka perlu ada alternatif pemecahannya, antara lain : (1) bahwa kita harus menguasai budaya yang rasionalistik. Kita harus optimis bahwa masa depan dapat dikuasai dan diprediksi manakala kita kreatif, inovatif dan kompetitif; (2) mengingat IPTEK akan menguasai masa depan , maka suatu keharusan untuk menguasai IPTEK, walaupun IPTEK sendiri sulit untuk diramalkan dan dikembangkan; (3) melalui pemberdayaan rakyat dalam pendidikan. Pemberdayaan yang dilakukan secara kontinue akan menghasilkan orang yang sadar akan pentingnya pendidikan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Di samping itu dapat menjadikan orang mempunyai pemikiran yang kritis, obyektif, kreatif dan inovatif. Pemberdayaan dapat dilakukan secara langsung yakni melalui peningkatan kesejahteraan terhadap para guru serta personal yang bekerja di bidang pendidikan. Pemberdayaan secara tidak langsung dapat dilakukan melalui pembentukan undang-undang guru; (4) melakukan reformasi dengan tetap mengedepankan kepentingan bangsa dan negara sehingga akan terwujud suatu tatanan dan iklim yang baik di bidang pendidikan, sebab reformasi bukan merupakan usaha pengrusakan, melainkan mengarah pada penataan kembali hal-hal yang menyimpang dari aturan; (5) kita kembali ke konsensus nasional, yakni penggunaan GBHN sebagai strategi untuk menghadapi masa depan, tentunya GBHN produk Majelis yang dikehendaki oleh rakyat. Melalui pelita demi pelita dalam menyongsong masa depan justru akan terjadi pendewasaan diri.

Arah Pengembangan

Program pengembangan pendidikan hendaknya diarahkan pada : (1) peningkatan

kualitas sumber daya manusia. Sebab sumber daya manusia yang berkualitaslah yang akan mampu bersaing di era sekarang maupun mendatang; (2) peningkatan kuantitas dan kualitas sarana pendidikan. Melalui sarana yang lengkap dan memadai akan mampu mendukung pencapaian secara optimal tujuan pendidikan; (3) perbaikan dan penyempurnaan kurikulum dengan tetap berorientasi pada imtaq dan iptek. Sehingga akan terbentuk sumber daya manusia yang mempunyai keseimbangan, keserasian dan keselarasan antara penguasaan keilmuannya dan religiusnya; (4) peningkatan kualitas proses pendidikan. Proses inilah yang akan menghasilkan ouput, maka proses pendidikan harus mendapatkan perhatian.

Dari keempat, komponen tersebut saling terkait antara satu dengan yang lain mengarah pada tujuan pendidikan nasional.

Kesimpulan

Pemberdayaan rakyat dalam bidang pendidikan perlu dilakukan secara terus menerus. Untuk mewujudkan suatu tatanan di bidang pendidikan yang sesuai dengan perkembangan dan tuntutan masyarakat mutlak diperlukan adanya reformasi. Sebab pada dasarnya reformasi merupakan usaha secara sadar untuk melakukan perubahan-perubahan dalam rangka mewujudkan cita-cita.

Banyak permasalahan yang muncul di bidang pendidikan yang dapat menghambat, pencapaian tujuan, antara lain munculnya praktek KKN (Korupsi Kolusi, dan Nepotisme), belum berjalannya praktek demokrasi memerlukan penanganan secara serius.

Untuk mempercepat pencapaian tujuan pendidikan nasional diperlukan arah dan pengembangan pendidikan secara terpadu.

RUJUKAN

- Koento Wibisono 1983. *Arti Perkembangan Menurut Filsafat Positivisme Auguste Comte*. Yogyakarta : UGM Press.
- Sutopo, H.B. 1993. *Strategi Pembinaan Idialisme, Aspirasi, Motivasi dan Dedikasi Tenaga Edukatif*. Dalam Historika No. 6 Tahun V, Surakarta. Program Pasca Sarjana UNS.
- Oemar Hamalik. 1991. *Pendidikan Guru Konsep dan Strategi*. Bandung : Mandar Maju.
- Sastra Pratedjo. (1986) *Masalah Etnis dari Perkembangan Ilmu dan Teknologi, Menguak Mitos-mitos Pembangunan*. Jakarta : Gramedia.
- Simanjuntak. 1970. *Perkembangan Teori di Bidang Sumber Daya Manusia*. Jakarta.
- Siwabessy. 1993. *Pembinaan Ilmu dan Teknologi dalam Meningkatkan Sumber Daya Manusia Menyongsong PJP II*. Dalam Jurnal Pendidikan No. 13. Jakarta : PT. Lanto Putra Perkasa.
- Sutoyo. 1996. *Strategi Pengembangan Tenaga Edukatif*. Dalam AN NABA No. 12 Tahun III, Surakarta. POLTEK.
- Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional. 1993. Jakarta : Sinar Grafika.